BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah Negara besar yang memiliki 416 Kabupaten dan 98 Kota, di mana setiap Kabupaten dan Kota tersebut memiliki sebuah badan publik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Badan Publik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, judikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

DPRD sebagai sebuah lembaga perwakilan adalah tempat masyarakat menyampaikan aspirasi dan menyuarakan kepentingannya, selain itu DPRD juga memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah bersama Pemerintah Daerah. Melalui lembaga ini nantinya akan keluar kebijakan-kebijakan yang akan menjadi dasar bagi eksekutif dalam

menjalankan roda pemerintahan, baik yang diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah, pengawasan, maupun anggaran.

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya DPRD harus mampu menjaring aspirasi masyarakat sebagaimana amanat dari Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Untuk itu anggota DPRD dituntut mampu berhubungan dengan masyarakat secara berkesinambungan. DPRD sebagai badan publik dituntut hendaknya bisa selalu memberikan informasi yang benar dan valid, sehingga tidak menyesatkan masyarakat. Karena dengan adanya keterbukaan informasi akan menjadi jembatan bagi masyarakat untuk dapat melakukan pengawasan kepada pemerintah.

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam menjaring aspirasi masyarakat oleh DPRD, adalah dengan memanfaatkan saluran komunikasi. Saluran komunikasi merupakan salah satu bagian yang amat penting dalam konteks komunikasi politik. Saluran komunikasi politik merupakan sarana yang digunakan untuk memudahkan penyampaian pesan-pesan politik kepada masyarakat. Saluran komunikasi politik mencakup segala sesuatu pihak atau unsur yang memungkinkan sampainya pesan-pesan politik dari komunikator politik kepada khayalak yang hendak dituju. Dalam konteksnya, terdapat tiga saluran komunikasi politik yang penting untuk dipergunakan dalam setiap kegiatan politik yaitu, saluran komunikasi massa, saluran komunikasi interpersonal dan saluran komunikasi organisasi.

Seiring berkembangnya zaman dan kecanggihan teknologi komunikasi, dewasa ini saluran komunikasi massa yang paling banyak digunakan sebagai

saluran komunikasi politik adalah dengan memanfaatkan media baru yaitu internet. Internet memiliki sifat terbuka, akses tanpa batas, dan siapa saja dapat berkomunikasi memperoleh serta berbagi informasi. Media internet yang paling banyak digunakan adalah jejaring sosial, diantaranya seperti *facebook, twitter, youtube, instagram, line, whatsapp, blog* maupun *website*. Bahkan media internet ini mampu menjadi saluran komunikasi tersendiri dalam kegiatan berpolitik (Siagian, 2015).

Internet telah menjadi media yang sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan politik dalam masyarakat Indonesia. Hampir semua hal yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan sekarang bisa diakses lewat *website* lembaga mereka masing-masing. Bahkan, setiap warga negara Indonesia dapat menyampaikan keluhan, tuntutan, dan harapan mereka secara langsung kepada pemerintah maupun pejabat pemerintah tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu melalui saluran komunikasi ini. Yasir (2014) mengatakan, internet mampu menjadi salah satu media massa yang sangat berpengaruh atau bahkan bisa menjadi media massa yang unggul, khususnya dalam dunia politik dan pemerintahan di Indonesia. Internet dikatakan juga mampu mengubah cara komunikasi politik, tidak heran bila seiring meningkatnya pengguna internet di Indonesia maka komunikasi politik dan wacana publik di Indonesia akan ikut berubah. Perubahan ini tentunya dapat mengubah wajah demokrasi di Indonesia lebih terbuka dengan kontrol publik sepenuhnya, dan selaras dengan karakteristik yang dimiliki oleh saluran komunikasi ini.

Kementerian Kominfo Republik Indonesia menyebut bahwa pengguna internet Indonesia telah mencapai 54 persen atau 143 juta dari 265 juta jiwa penduduk Indonesia. Data ini dikemukakan pada kegiatan Sosialisasi Pemilu Serentak Tahun 2019 serta Literasi Media, bertempat di Hotel Merapi Merbabu, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 17 November 2018.[1] Dari data tersebut terlihat bahwa keberadaan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat pengguna internet yang aktif. Sehingga, dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan internet seyogianya dapat pula dimanfaatkan oleh DPRD secara positif sebagai saluran komunikasi politik serta peluang besar untuk mendekatkan diri dengan masyarakatnya, baik untuk menyosialisasikan kegiatan, menyerap informasi dan aspirasi, serta berkomunikasi langsung untuk mengetahui keinginan rakyat, sehingga program-program dapat berjalan dan terlaksana sebagaimana fungsinya (Hikmat, 2018). Bahkan Mulyana (2013: 24) mengatakan, penggunaan media kontemporer seperti internet, dan khususnya media sosial akan semakin penting dalam komunikasi politik di Indonesia, mulai dari tingkat lokal hingga tingkat global. Sejalan dengan itu konsep-konsep baru seperti *e-democracy* dan *e-government*, di negara ini pun akan semakin terus berkembang.

Alfiyani (2018) juga menyebutkan, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kecepatan luar biasa dalam pertumbuhan teknologi dan media baru. Dalam hal jejaring sosial, Indonesia menjadi salah satu pengguna terbanyak di dunia. Perkembangannya merasuk hingga pelosok nusantara, dan penggunanya dari berbagai kalangan. Dengan begitu banyaknya jenis dan

[1] https://kominfo.go.id/content/detail/15380/kementerian-kominfo-sebut-pengguna-internet-indonesia-capai-54-persen/0/sorotan_media (diakses tanggal 04 Maret 2019).

pengguna di setiap jejaring sosial yang kini semakin berkembang, membuat banyak pula berbagai kalangan dengan sengaja memanfaatkannya untuk dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai, bahkan hampir dalam segala aspek kehidupan. Salah satu bidang yang cukup banyak dan sangat bergantung dengan teknologi komunikasi adalah bidang politik. Karena pada bidang politik ini, perkembangan teknologi dan media baru menjadi salah satu hal yang sangat penting sebagai saluran komunikasi politik.

Penelitian yang dikemukan oleh Laeli (2014) menyimpulkan bahwa penggunaan internet sebagai hasil dari perkembangan teknologi di abad 21 melahirkan suatu masyarakat jaringan yang lebih banyak melakukan aktifitasnya di ruang berbasis digital ini. Hal itulah yang menyebabkan para aktor politik merasa perlu untuk melakukan berbagai kegiatan politik di internet. Penelitian ini juga merekomendasikan agar penggunaan internet sebagai media dalam berpolitik nantinya dapat dieksplor lebih dalam lagi, guna menciptakan suatu pendidikan politik yang akhirnya akan menciptakan tatanan politik yang lebih baik lagi.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Suardi (2016) mengatakan bahwa, semakin luasnya penggunaan media internet khususnya media sosial yang mulai merata disemua kalangan masyarakat, membuka peluang tersendiri dalam penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi politik. Mengakibatkan semakin banyaknya para politisi sebagai calon pejabat eksekutif, memiliki *blog* dan situs mereka masing-masing. Mereka menjadi anggota dan pengguna jejaring sosial terkemuka, seperti *facebook* dan *twitter* dalam menarik pengikut sebanyak-

banyaknya dalam meraih dukungan khalayak guna menduduki jabatan yang mereka inginkan.

Berdasarkan referensi dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa internet sebagai media baru bisa dijadikan sebagai saluran komunikasi politik antara anggota DPRD dengan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi. Internet mampu menjadi suatu wadah baru yang bisa menjadi penghubung antara anggota DPRD dengan masyarakat dalam berkomunikasi, sehingga informasi dan kebutuhan yang diinginkan masyarakat dapat diakses dengan mudah, cepat dan praktis.

Menurut survei yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tanggal 16 Mei 2019, Sumatera Barat merupakan provinsi dengan konstribusi pengguna internet terbanyak nomor tiga di Pulau Sumatera, yakni mencapai 2,6%.[2] Dari data tersebut terlihat bahwa masyarakat Sumatera Barat termasuk masyarakat yang cukup melek dengan media baru tersebut yaitu internet. Hal ini sangat bisa dimanfaatkan oleh DPRD Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat untuk bisa lebih menyerap aspirasi masyarakatnya, melalui saluran komunikasi politik alternatif tersebut yaitu internet.

Penelitian yang dikemukakan oleh Lestari, et. al (2017), menyatakan media *online* mampu memberikan ruang atau kesempatan kepada masyarakat Kota Padang untuk berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat, sebaliknya media *konvensional* belum memberikan rangsangan dan juga wadah untuk masyarakat dalam berdemokrasi. Dari uji korelasi yang sudah dilakukan terlihat adanya

[2] https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/survei-apjii-sumatra-utara-pengguna-internet-tebesar-di-pulau-sumatra (diakses tanggal 14 Maret 2020).

hubungan antara pengguna media *online* dengan partisipasi terhadap isu-isu publik, sebaliknya pengguna media *konvensional* hanya mengetahui isu-isu di sekitar tempat tinggal saja, sehingga belum mampu melakukan tindakan apapun jika terjadi sebuah masalah.

Kemudian Sumartono (2019) menyebutkan, pemanfaatan internet khususnya *facebook* sebagai saluran komunikasi politik saat ini menjadi sebuah keniscayaan bagi para politisi. *Facebook* berfungsi sebagai media komunikasi gratis bagi politisi untuk mendistribusikan segala macam informasi kepada masyarakat. Munculnya respons positif dari masyarakat yang ditampilkan secara *online* menjadi potret eksistensi seorang politisi. Semakin banyak masyarakat yang memberikan respons "*like*" atau komentar positif menjadi cerminan bahwa keberadaan seorang politisi disambut positif oleh masyarakat. Ketiga informan yang merupakan politisi di Kota Padang berpendapat bahwa media *facebook* sangat membantu mensosialisasikan keberadaan anggota legislatif, baik pada masa sebelum maupun setelah menjadi anggota DPRD kepada masyarakat. Sehingga, media massa yang selama ini menjadi andalan dalam sosialisasi dapat tergantikan oleh media *online*.

Berikut adalah tabel pemanfaatan internet sebagai saluran komunikasi politik yang digunakan oleh DPRD Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, yang telah dimanfaatkan untuk bertukar informasi dengan masyarakat dan penjaringan aspirasi dalam bentuk media sosial (*facebook* dan *instagram*) serta *website* resmi, yaitu:

Tabel 1.1
Pemanfaatan Media Internet oleh DPRD Kabupaten/Kota di Sumbar

Kabupaten/Kota di Sumbar	Alamat *Website*	Akun *Facebook*	Akun *Instagram*
Kabupaten Agam	dprd.agamkab.go.id	Sekretariat Dprd Kab Agam (update terakhir 13/03/2020)	agamhumasdprd (update terakhir 04/01/2020)
Kabupaten Dharmasraya	setwan.dharmasrayakab.go.id	Dprd Kabupaten Dharmasraya (update terakhir 11/03/2020)	dprdkabupatendharmasraya (update terakhir 13/02/2019)
Kabupaten Kep. Mentawai	-	Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Mentawai (update terakhir 16/08/2016)	-
Kabupaten Lima Puluh Kota	dprd_limapuluhkotakab.go.id	-	dprd.limapuluhkotakab (update terakhir 29/02/2020)
Kabupaten Padang Pariaman	dprd.padangpariamankab.go.id	Dprd Kab. Padang Pariaman (update terakhir 05/03/2020)	-
Kabupaten Pasaman	-	DPRD Kabupaten Pasaman (update terakhir 14/02/2020)	-
Kabupaten Pasaman Barat	-	Sekretariat Dprd Kabupaten Pasaman Barat (update terakhir 13/03/2020)	-
Kabupaten Pesisir Selatan	dprd.pesisirselatankab.go.id	DPRD Pesisir Selatan (update terakhir 23/06/2018)	-
Kabupaten Sijunjung	-	Humas DPRD Kabupaten Sijunjung (update terakhir 03/03/2020)	-
Kabupaten Solok	dprd.solokkab.go.id	DPRD Kab. Solok (update terakhir 17/04/2015)	-

Kabupaten/Kota di Sumbar	**Alamat *Website***	**Akun *Facebook***	**Akun *Instagram***
Kabupaten Solok Selatan	-	Humas DPRD KAB. SOLSEL (update terakhir 13/03/2020)	-
Kabupaten Tanah Datar	tanahdatar.go.id/dprd	DPRD Tanah Datar (update terakhir 20/01/2020)	-
Kota Bukittinggi	-	***DPRD Kota Bukittinggi (update terakhir 10/02/2016)***	-
Kota Padang	-	Dprd Kota Padang (update terakhir 28/10/2019)	-
Kota Padang Panjang	dprd.padangpanjang.go.id	Humas DPRD Kota Padang Panjang (update terakhir 10/08/2019)	sekretariat_dprd_padangpanjang (update terakhir 25/01/2020)
Kota Pariaman	-	Sekretariat Dprd Pariaman (update terakhir 13/03/2020)	dprd.pariaman (belum ada postingan)
Kota Payakumbuh	-	Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh (update terakhir 07/03/2020)	-
Kota Sawahlunto	dprd.sawahluntokota.go.id	-	-
Kota Solok	dprd.solokkota.go.id	Humas Dprd Kota Solok (update terakhir 26/06/2014)	-
Provinsi Sumbar	dprd.sumbarprov.go.id	Dprd Provinsi Sumbar (update terakhir 13/03/2020)	dprd.sumbar (update terakhir 11/03/2020)

Sumber: Olahan Data Penelitian, pertanggal 14/03/2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada umumnya Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat telah menggunakan internet yaitu media baru sebagai salah satu media alternatif dalam berkomunikasi dengan konstituennya. Walaupun memang tidak langsung ketiganya saluran komunikasi politik ini digunakan secara bersamaan dalam berkomunikasi, namun paling tidak

ada salah satu media yang aktif selalu digunakan untuk meng-*update* setiap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Peneliti mengambil lokasi penelitian pada DPRD Kota Bukittinggi, karena dapat dilihat bahwa DPRD Kota Bukittinggi termasuk salah satu lembaga legislatif yang bisa dikatakan tidak lagi memaksimalkan pemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik, yaitu internet sebagai saluran komunikasi politik. Fakta ini juga didukung dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Kasubag Program dan Keuangan (Ishna Rizqi Amalia, SE, M. Si), serta pelaksana pada Sub. Bagian Penganggaran pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan (Erick Seftian Arli, A.Md) di Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi. Mereka mengatakan bahwa, memang ada media internet yang digunakan oleh DPRD Kota Bukittinggi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat seperti *facebook*, namun pemanfaatan *facebook* tidak pernah dioptimalkan. Ini terbukti dengan melihat postingan terakhir pada akun DPRD Kota Bukittinggi yaitu tanggal 10 Februari 2016. Sedangkan untuk *instagram*, DPRD Kota Bukittinggi tidak memiliki akun sama sekali. Selain itu, sampai saat ini DPRD Kota Bukittinggi juga tidak bisa mengelola *website* nya dengan baik, hal ini dibuktikan dengan sulitnya menemukan alamat *link direktory* nya pada *website* resmi Pemerintah Kota Bukittinggi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa *website* resmi DPRD Kota Bukittinggi memang belum dioptimalkan fungsinya dengan baik.

Beranjak dari masalah tersebutlah, peneliti ingin mengetahui mengapa DPRD Kota Bukittinggi tidak lagi memanfaatkan media internet sebagai salah

satu saluran komunikasi politik padahal sejatinya bisa dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat, serta mengetahui saluran komunikasi apa saja yang telah digunakan oleh DPRD Kota Bukittinggi dalam menyerap aspirasi tersebut. Selain itu peneliti juga berusaha menganalisis kebutuhan saluran komunikasi seperti apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh DPRD Kota Bukittinggi agar komunikasi yang terjadi antara DPRD Kota Bukittinggi dengan masyarakatnya bisa lebih efektif dan efisien, khususnya dalam penjaringan aspirasi. Maka hal ini dapat dituangkan dalam bentuk penelitian yang berjudul "Saluran Komunikasi Politik DPRD Kota Bukittinggi dalam Menyerap Aspirasi Konstituen".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana cara DPRD Kota Bukittinggi dalam menyerap aspirasi konstituennya, dan mengapa belum memaksimalkan pemanfaatan media internet sebagai saluran komunikasi politik"?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut, untuk:

1. Mengetahui saluran komunikasi politik yang digunakan oleh DPRD Kota Bukittinggi dalam menyerap aspirasi konstituen.

2. Mengetahui hambatan komunikasi DPRD Kota Bukittinggi yang belum memaksimalkan pemanfaatan media internet sebagai saluran komunikasi politik.
3. Menganalisis kebutuhan saluran komunikasi politik yang diinginkan dan diharapkan oleh DPRD Kota Bukittinggi untuk menyerap aspirasi konstituen.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, memberikan wawasan dan pengetahuan baru, menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, serta mampu memperkaya konsep terhadap ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan saluran komunikasi politik DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakatnya, terutama konstituen di daerah pemilihannya masing-masing.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi kepada DPRD Kota Bukittinggi dalam menyerap aspirasi masyarakat, terutama dalam pemanfaatkan aplikasi *mobile* berbasis *android* yang telah dirancang untuk mengefektifkan komunikasi antara DPRD dengan konstituennya. Sehingga, komunikasi yang disampaikan bisa tepat sasaran, dan dapat membangun serta memelihara hubungan baik dalam elemen masyarakat.